



# QUARTERDECK

## Pengantar Redaksi

Berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, TNI Angkatan Laut untuk pertama kalinya dalam sejarah pada Februari 2009 akan mengirimkan unsur kapal perang ke Lebanon guna berpartisipasi dalam Operasi Perdamaian Maritim. Partisipasi TNI Angkatan Laut dalam Operasi Perdamaian Maritim merupakan sebuah langkah maju, sebab paradigma lama di Indonesia tentang Operasi Perdamaian adalah pengiriman kekuatan darat. Padahal sejak berakhirnya Perang Dingin, Operasi Perdamaian Maritim, dalam berbagai bentuk, telah menjadi salah satu kecenderungan umum di dunia. Quarterdeck edisi Januari 2009 membahas beragam aspek yang terkait dengan Operasi Perdamaian Maritim. Selamat membaca.

### Pembina:

Asrena Kasal

### Pemimpin Redaksi:

Laksda TNI (Purn) R. Mangindaan

### Wakil Pemimpin Redaksi:

Laksda TNI (Purn) Budiman D. Said

### Sekretaris Redaksi:

Kol Laut (Purn) Willy F. Sumakul

### Redaktur:

Alman Helvas Ali

### Distribusi:

Janet DE

### Alamat Redaksi:

FKPM, Gedung Gading Marina Lt.2

Jl. Raya Boulevard Barat No.1,

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Telp/Fax (021) 4516830

### Email:

fkpm.indonesia@gmail.com

### Dasar:

Skep KASAL No. Kep/03/V/2005

tanggal 31 Mei 2005 tentang

pembentukan FKPM dan S.Gas KASAL

No.S.Gas/42/XII/2006

a.n Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan

dkk 5 orang

Redaksi menerima tulisan dari luar secara selektif sesuai dengan misi FKPM. Naskah yang dimuat merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi di mana penulis bertugas.

Tidak dijual untuk umum

## Misi TNI Angkatan Laut Ke Lebanon: Peacekeeping Operations

Oleh: Robert Mangindaan

### 1. Latar Belakang

Banyak pihak kurang menyadari bahwa *Peacekeeping Operations* (PKO) yang dikembangkan belakangan ini, sudah tidak sama dengan bentuk dan jenis operasi (*traditional mission*) yang dilaksanakan pada tahun 1948, khususnya tahun 1956-67 yang diikuti oleh Indonesia. Pada usia ke-60 (2008), PKO sudah mengalami evolusi beberapa kali, baik bentuknya maupun temanya (*to complex multidimensional*). Situs resmi UNDPKO mengemukakan:

*The term "peacekeeping" is not found in the United Nations Charter and defies simple definition. Dag Hammarskjöld, the second UN Secretary-General, referred to it as belonging to "Chapter Six and a Half" of the Charter, placing it between*

*traditional methods of resolving disputes peacefully, such as negotiation and mediation under Chapter VI, and more forceful action as authorized under Chapter VII.*

*Over the years, UN peacekeeping has evolved to meet the demands of different conflicts and changing political landscapes. It has proved itself to be an efficient and cost-effective international instrument to restore peace in post-conflict situations. In addition to military functions, today's UN peacekeeping undertakes a wide variety of other complex tasks.*

*Peacekeepers now are administrators and economists, police officers and legal experts, de-miners and electoral observers, human rights monitors and specialists in civil affairs, gender,*

*governance, humanitarian workers and experts in communications and public information. UN peacekeeping continues to evolve, rising to meet new challenges and political realities.*

Praktek di lapangan memperlihatkan peran PKO yang semula sebatas 'melerai', kini kontingennya sudah dipersenjatai dan diberi mandat untuk melucuti pihak-pihak yang bertikai. Bahkan lebih jauh lagi, mereka diberikan tugas untuk menegakkan pilar demokrasi di daerah konflik. Lingkup penugasannya, sudah demikian luas, mulai dari (i) *to helping to build sustainable institutions of governance*, (ii) *to human rights monitoring*, (iii) *to security sector reform*, sampai pada (iv) *to the disarmament, demobilization and reintegration of former combatants*.<sup>1</sup>

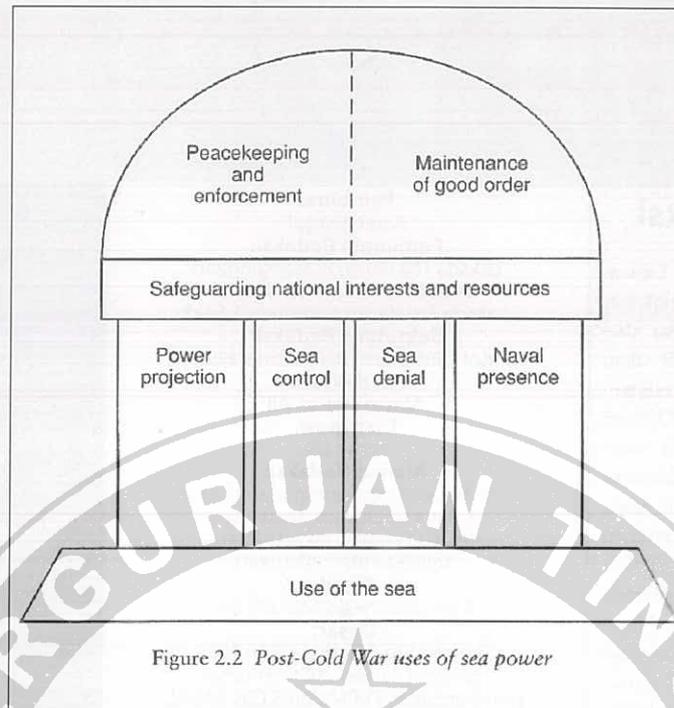
ISSN 1978-9882



9 771978 988294

# Misi TNI Angkatan Laut Ke Lebanon: *Peacekeeping Operations*

Ada frase yang sangat dipahami oleh banyak pihak, terutama kalangan perencana strategi militer yaitu—*new era—new requirement*. Penjabarannya dilaksanakan dengan membenahi semua instrumen operasionalnya, terutama doktrinnya. Salah satu contohnya adalah penugasan Angkatan Laut dalam misi pemeliharaan perdamaian. Michael Pugh menulis dalam bukunya “*Maritime Security and Peacekeeping—A Framework for United Nations Operations*”, menggambarkan bahwa peran Angkatan Laut masa kini adalah dalam Figure 2.2.<sup>2</sup>



Bagi TNI Angkatan Laut, pelibatan kapal perang dalam misi pemeliharaan perdamaian sudah merupakan tugas yang harus dilaksanakan, yang memang sudah merupakan amanah konstitusi. Dalam pelaksanaannya, sudah jelas perlu memahami berbagai aspek mulai dari *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*, geopolitik, *best practice* dan seterusnya sampai pada ‘bocoran’ pengalaman dari berbagai pihak.

## 2. Lingkungan Strategis

Memetakan ragam konflik yang berkembang sekarang ini, memperlihatkan ada empat bentuk yang satu dengan yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut akan membawa pengaruh pada semua aspek operasional, mulai dari perencanaan, persiapan, sampai pada pelaksanaannya. Keempat ragam konflik tersebut adalah sebagai berikut; (i) konflik antar negara/*inter-state conflict*, (ii) konflik di dalam negara/*intra-state conflict*, (iii) konflik akibat kejahatan lintas negara/*trans-national crime*, dan (iv) operasi pemberian bantuan kemanusiaan/*humanitarian assistance*<sup>3</sup>.

Sejak tahun 1990-an ragam konflik yang berkembang adalah konflik di dalam negara, mengkombinasikan dua elemen yang kuat—faktor identitas yang kuat, berdasarkan perbedaan dalam ras, agama, kultur, bahasa dan seterusnya, dengan pandangan ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik, dan sosial.<sup>4</sup>

Dari berbagai konflik dan penyelenggaraan operasi pemeliharaan perdamaian (PKO), ada beberapa poin yang dapat dipelajari. Yaitu; (i) umumnya konflik di dalam negara kebanyakan terjadi di negara berkembang, dan katanya—*institusi sistem demokratik belum berjalan*, (ii) kendali PKO biasanya berada di tangan negara maju, yang didukung dengan instrumen operasional yang sangat kuat dengan dana yang memadai, khususnya sang adidaya, (iii) mandat yang diberikan sangat dipengaruhi oleh sikap P-5 yaitu negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, khususnya sang adidaya.

Menarik untuk dicermati konflik di Libanon, yaitu tampilnya kekuatan *non-state actor* mampu berperang melawan satu negara, yang jajarannya

militernya sangat terlatih dan memiliki peralatan dan perlengkapan paling canggih. Bagi kalangan perencana strategi sebenarnya sudah diingatkan oleh Liotta-Lloyd pada diagram STRATEGY AND FORCE PLANNING FRAMEWORK.<sup>5</sup>

Dengan menggunakan diagram tersebut, tentunya banyak pihak dapat mempelajari bagaimana kontingen lainnya mempersiapkan unturnya untuk melaksanakan misi PKO di Libanon. Terutama dengan mencermati kotak mengenai *threats, challenges, opportunities,*

berikut kotak mengenai *allies, friendly nations, international institution, dan non-state actor*. Kedua kotak tersebut memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk merancang *code of conduct* dari semua unsur operasional, yang sesuai dengan tiga kepentingan yaitu berpegang pada *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*, dapat menyesuaikan dengan atmosfer politik daerah operasi dan membawa kepentingan Indonesia di kawasan tersebut.

## 3. Aspek Operasional

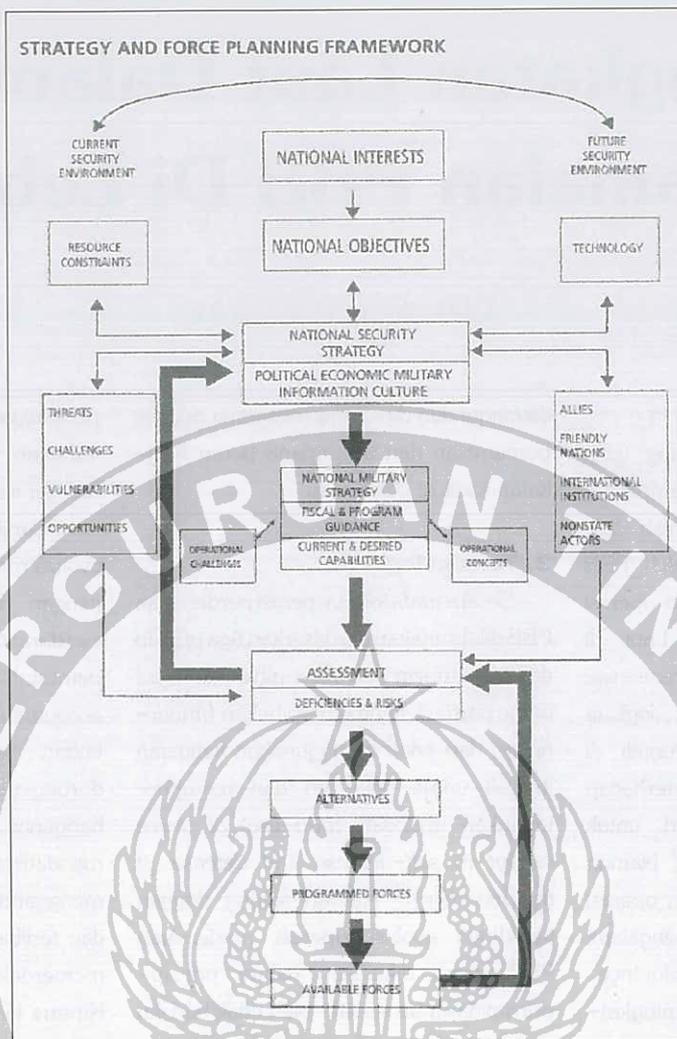
Pada aras operasional, ada tiga hal yang umumnya perlu diperhatikan, yaitu *command and control, rapid response, dan interoperability*. Dalam organisasi militer, khususnya dalam struktur multinational, pengetahuan terhadap ketiga hal tersebut merupakan prasyarat mutlak. Bukan mustahil bahwa pihak negara maju akan bersikap proaktif untuk mengembangkan SOP, yang sesuai doktrin dan *compatible* dengan *operating system* alutsista mereka. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, tidak jalan lain kecuali belajar dan apabila memungkinkan dilakukan

# Misi TNI Angkatan Laut Ke Lebanon: *Peacekeeping Operations*

sedini mungkin. Misalnya, selagi ada waktu di Jakarta dengan mengundang Atase Pertahanan dari kedutaan yang terkait.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan PKO, seperti halnya bagian intelijen akan selalu dipegang (baca: dikendalikan) oleh negara maju atau sekutunya. Praktis, penyelenggaraan kegiatan operasional akan bersandar pada *briefing* intelijen yang disiapkan oleh komando atas. Pengalaman tersebut mengisyaratkan bahwa kontingen Indonesia perlu membangun *intelligence network* (secara cerdas) dengan berbagai pihak, dengan tujuan ada (konfirmasi) gambaran umum mengenai situasi yang dihadapi.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa ada daerah operasi yang prestisius dan ada pula yang pinggiran dengan risiko tinggi. Tidak jarang kontingen negara berkembang (yang lemah dalam *command and control*, *rapid response*, *interoperability*), akan ditugaskan pada daerah pinggiran yang berisiko tinggi. Dalam bahasa di kampung saya—kerbau punya susu, sapi dapat nama



Penugasan dalam misi PKO adalah tugas kemanusiaan dan memang sudah menjadi amanah bagi setiap warga bangsa Indonesia, sesuai dengan konstitusi. Namun perlu disadari bahwa penugasan tersebut sudah pasti mengeluarkan biaya, ada *cost* yang akan ditanggung oleh negara. Berbicara mengenai *cost*, tentunya tidak selalu

dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, pikiran, politik dalam rangka *influence building* dan seterusnya.

Dalam setiap misi PKO sudah jelas akan ada *cost*, tetapi sudah sewajarnya ada pula *benefit* yang diinginkan. Setiap negara peserta misi PKO sudah menghitung berapa *cost* dan *benefit* apa saja yang (semaksimal) mungkin dapat diraih. Secara garis besar *benefit* yang diinginkan akan berkisar pada tiga aspek yaitu politik, ekonomi dan militer.

Bagi kontingen Indonesia tentunya sudah juga berhitung mengenai *benefit* yang akan diperoleh, minimal dalam bidang politik. Keuntungan dalam bidang ini hanya mungkin dikembangkan dengan memanfaatkan kekuatan media massa, baik elektronik maupun media cetak, dengan sasarannya adalah masyarakat internasional. Ada pesan penting yang perlu digemakan dengan santer dan berulang kali, yaitu *sense of humanity* bangsa Indonesia yang sangat kuat dan jangan menganggap kontingen PKO Indonesia sebagai UN *mercenaries*.

Selamat bertugas.

1. Download dari situs UN. DPKO
2. Pugh, Michael. "Maritime Security and Peacekeeping-A Framework for United Nations Operations". Manchester University Press, New York, 1994
3. Ragam yang keempat tersebut banyak kali diperdebatkan (terutama dari pihak Negara maju) sehingga perlu dielaborasi tersendiri.
4. Harris dan Reilly, "Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator"- Seri Buku Pegangan, International IDEA. 2000
5. P. H. Liotta dan Richmond M. Lloyd "FROM HERE TO THERE-The Strategy and Force Planning Framework"- Naval War College Review, Spring 2005, Vol. 58, No. 2.